

BAB III

BERKEMBANGNYA ISLAMOPHOBIA DI PERANCIS DITENGAH KOMITMEN PRESIDEN FRANCOIS HOLLANDE TAHUN 2015-2016

Bab ini memaparkan mengenai dinamika muncul dan berkembangnya fenomena islamophobia ditengah nilai-nilai demokrasi dan kebebasan secara gencar dipromosikan oleh negara Perancis. Dimulai dengan menjelaskan kedatangan muslim ke Eropa hingga masuk ke Negara Perancis, yang bermula hanya sebagai pekerja untuk mengisi kekosongan sektor-sektor industri paska Perang Dunia, hingga memutuskan untuk menetap dan menjadi sebuah kelompok yang hidup berdampingan dengan masyarakat lokal. Namun, nilai-nilai demokrasi yang dipromosikan Perancis dengan harapan dapat mencakup seluruh entitas masyarakat pada pengaplikasiannya masih mengesampingkan hak dan kebebasan masyarakat muslim. Dibuktikan dengan meningkatnya angka diskriminasi dan aksi-aksi kekerasan pada muslim Perancis (islamophobia) pada tahun 2015-2016 pada saat Presiden Francois Hollande aktif mempromosikan perdamaian.

A. Islam di Eropa

1. Masuknya Islam di Eropa

Hubungan Eropa dengan dunia Islam memang sudah terjalin selama berabad-abad. Peristiwa-peristiwa bersejarah menghantarkan keduanya untuk saling berinteraksi dan mengadakan hubungan timbal balik. Sejak terjadinya peristiwa negara Andalusia (756-1492) di Semenanjung Iberia, kemudian selama Perang Salib (1095-1291), serta penguasaan wilayah Balkan oleh kekhalifahan Utsmaniyah (1389) (Aliyudin, 2008). Islam hadir menjadi kekuatan besar di Eropa dengan menguasai berbagai wilayah dengan kurun waktu yang cukup lama, yakni 800 tahun di Spanyol (ditambah 100 tahun dalam kekaisaran), 500 tahun di Yunani, 300 tahun di Balkan, dan lebih dari seabad di negara-negara seperti Sisilia, Hongaria dan Romania. Orang-

orang muslim yang datang ke Eropa terkadang lebih suka bertahan dan menetap di wilayah negara yang dikuasai, meskipun kedaulatan muslim telah berakhir. Banyak diantara mereka yang dipaksa untuk berpindah agama dan dikembalikan ke negara asal. Walaupun demikian, unsur-unsur dari peninggalan peradapan dan budaya di masa lalu tetap tersisa dan tidak bisa dihilangkan, seperti arsitektur, bahasa, musik, hingga makanan (Berber, 2014).

Penyebaran Islam di Barat dimulai ketika bangsawan dari Dinasti Umayyah Tāriq Ibn Ziyād melintasi Selat Gibraltar dengan pasukannya pada tahun 711 untuk menaklukan Kekaisaran Visigoth, lalu mulai untuk mendirikan Islam al-Andalus kurang dari 80 tahun sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW (Schmidinger, 2012). Kota-kota megah di daratan Eropa seperti Cordoba, Granada, Sevilla, dan Vallencia satu per satu jatuh ke tangan bangsa Muslim yang terus menunjukkan kekuatannya. Dibawah kepemimpinan Abd al Rahman III (912-961 M), peradaban Islam di Eropa khususnya di Spanyol mencapai puncak kejayaan dengan Cordova sebagai ibu kota. Kota itu sangat berharga, dimana ilmu, seni dan budaya tumbuh dengan pesat dibawah bimbingan Islam (Hambali, 2016). Ilmu pengetahuan berkembang secara pesat, muncul berbagai universitas terkemuka yang menjadi tempat untuk menimba ilmu orang-orang dari seluruh dunia. Phillip K. Hitti mengungkapkan bahwa kaum muslimin Spanyol telah memberikan catatan yang mengagumkan dalam sejarah intelektual pada masa itu (Asy'ari, 2018).

Sejarah premodern Islam di Eropa Barat terdiri dari dua bagian, *pertama*, abad ke-8 hingga akhir abad ke-15 ada beberapa wilayah yang dikuasai oleh Muslim dengan Islam sebagai mayoritas, seperti di Spanyol, Sicilia, daerah-daerah kecil di Italia Selatan dan Perancis Selatan.. *Kedua*, sejarah yang menunjukkan bahwa mulai abad ke-19 Islam ada sebagai minoritas di Eropa Barat, ketika para penguasa Kristen (terkhusus di Semenanjung Iberia) memutuskan untuk menjual kaum minoritas sebagai budak, bukan lagi untuk dieksekusi.

Memang pada penghujung abad ke-11, fenomena sisial budak Muslim di wilayah-wilayah Kristen menjadi semakin marak dan memprihatinkan. Khususnya di Semenanjung Iberia, Italia, Perancis Selatan, dan Kepulauan Balearic (Aliyudin, 2008).

Islam hadir di bagian Timur Eropa melalui kekuasaan Ottoman yang dimulai sejak pertengahan abad ke-14. Ottoman menggantikan kekaisaran Byzantium dengan tetap mempertahankan kekaisaran yang multikultural dengan menunjukkan dominasinya di wilayah Balkan, dilihat dari mulai dilakukannya proses Islamisasi mayoritas penduduk. Akibatnya, Ottoman dipandang mengancam posisi Kristen di Mediteranian Timur dan Benua Eropa (Putri, 2016). Dengan pengaruhnya di wilayah Timur Eropa dan Tenggara, Ottoman melanjutkan pengaruhnya dengan melakukan berbagai penaklukan, diantaranya penaklukan kerajaan Kazam dan Astrakhan pada abad ke-16, kerajaan Qasim abad ke-17, serta Crimea di abad ke-18. Mayoritas orang-orang Albania dan Bosnia yang ada di bagian Tenggara Eropa, masuk Islam di bawah pemerintahan Ottoman. Kelompok-kelompok penurut Bahasa Slavik seperti beberapa orang Hungaria turut menjadi Muslim, selanjutnya Muslim juga tersebar di daerah Kosovo, Macedonia, dan sebagian kecil Roma (Schmidinger, 2012).

Selain faktor penguasaan daratan Eropa oleh umat muslim akibat kejayaan di masa lalu, kelompok-kelompok muslim di Eropa juga berasal dari para imigran pasca Perang Dunia II. Eropa hancur akibat perang dunia sehingga membutuhkan tenaga kerja untuk memperbaiki sistem ekonomi. Untuk mengatasi permintaan pasar akan tuntutan perbaikan ekonomi, Eropa mulai membuka pintu masuk bagi tenaga kerja murah dan tidak terampil untuk dipekerjakan pada sektor-sektor yang dibutuhkan dalam berbagai kelas, sehingga diharapkan perekonomian lokal dapat stabil kembali.

Banyak faktor mengapa sangat penting untuk membuka pasar tenaga kerja bagi orang asing diantaranya, *pertama*, harapan hidup di Eropa terus meningkat pesat, sementara angka

kelahiran menurun drastis akibat perang. *Kedua*, orang Eropa lebih menyukai pekerjaan yang diperuntukkan bagi mereka yang telah menjalani pelatihan dan pendidikan tinggi, karenanya mengakibatkan kurangnya tenaga kerja manual dan berketerampilan rendah. *Ketiga*, banyak dari penduduk Eropa ingin memiliki jam kerja yang lebih sedikit dalam seminggu, pergi liburan ketika ada waktu luang dan pensiun lebih awal. *Keempat*, selain motivasi ekonomi untuk menerima imigran masuk Eropa, terdapat juga perasaan bersalah dan malu atas kekejaman dan ketidakadilan yang ditimbulkan akibat fasisme dan kolonialisme di masa lalu. Akibat dari faktor-faktor diatas, Eropa mulai untuk merekrut tenaga kerja asing, terlebih daerah-daerah bekas koloninya terdahulu (Relevy, 2015).

Para imigran datang dan menetap untuk sementara waktu di daerah-daerah tertentu dengan persebaran yang sangat sesuai dengan jejak masa lalu kolonialisasi Eropa. Imigran yang menetap di Perancis dan Switzerland adalah orang-orang dari Maroko, Aljazair, Tunisia dan sejumlah Muslim dari Afrika Selatan Sahara. Negara Inggris banyak ditempati oleh imigran dari anak benua India, Pakistan, Malaysia, Bangladesh, Yaman, Somalia dan Afrika Utara. Imigran dari Indonesia juga banyak yang datang ke Belanda. Sedangkan Jerman memiliki sedikit perbedaan, imigran banyak datang dari Turki akibat Perjanjian *Gastarbeiter* (pekerja tamu) yang ditandatangani oleh kedua negara untuk memfasilitasi pemulihan Jerman pasca perang, bukan karena kolonialisasi masa lalu (Aliyudin, 2008).

Gelombang imigrasi pasca perang dunia pada saat itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang permanen, maka sedikit upaya untuk mengintegrasikan komunitas Muslim ke dalam masyarakat Eropa, tidak berusaha mempelajari bahasa atau kebiasaan negara-negara penerima, mengimpor produk dan makanan halal dan hidup seperti layaknya di negara asal. Mereka tinggal di kota-kota yang tersebar diseluruh Eropa, misalnya di Perancis umat Islam menetap *Ile-de-France*, *Provence-AlpesCôte D'azur*, *Rhône-Alpes*, dan *Nord-Pas de Calais*. Di Inggris mereka menetap di London, Midlands Barat,

Yorkshire Barat, Manchester dan Lancashire. (François & Souris, 2018).

2. Berkembangnya Islam di Eropa

Saat ini Muslim merupakan kelompok migran terbesar di Eropa, sebuah fakta sekaligus tantangan bagi pentingnya kerukunan yang dibentuk dari keragaman etnis, budaya, dan agama yang hidup di Benua Eropa (Triandafyllidou, 2015). Selama bertahun-tahun, komunitas Muslim Eropa berubah dari yang tidak terlihat menjadi berkali lipat lebih banyak jumlahnya. Pertumbuhan tersebut dihasilkan melalui 2 (dua) proses utama, yakni reunifikasi keluarga dan peningkatan yang terjadi secara alamiah (Relevy, 2015). Reunifikasi keluarga dimulai pada awal tahun 1970-an, ketika Eropa menghadapi resesi ekonomi yang secara bertahap menutup perbatasan negara mereka untuk pekerja imigran berketerampilan rendah, namun di satu sisi tetap mengizinkan adanya “reunifikasi keluarga”. Reunifikasi keluarga berarti pekerja imigran (terutama laki-laki muda) dapat mengajak atau mengirim keluarga mereka (istri, anak-anak, orang tua, atau bahkan saudara kandung) untuk bergabung tinggal di negara penerima. Peristiwa ini menjadi titik balik bagi meningkatnya jumlah imigran di Eropa.

Proses yang kedua yakni peningkatan secara alamiah, aliran migrasi yang sebelumnya telah terjadi dan diduga tidak akan menetap secara permanen, ternyata menunjukkan fakta berbeda. Beberapa imigran Muslim yang sudah tinggal lama di negara-negara Eropa memiliki peluang untuk mendapatkan kewarganegaraan. Tingginya angka kelahiran diantara kelompok muslim dan fenomena konversi/pindah agama juga sangat berkembang. Pada masa itu, beberapa selebritis banyak yang menunjukkan ketertarikannya terhadap Islam dan melakukan konversi agama, tanpa diduga banyak perhatian dan sorotan datang dari media. Peristiwa ini tentu membawa dampak secara signifikan bagi peningkatan jumlah populasi muslim di Eropa, melihat kondisi tersebut sulit untuk

dikendalikan (Relevy, 2015). Periode ini terlihat dengan adanya upaya dari beberapa negara yang menegakkan kebijakan imigrasi dengan membatasi dan memberikan amnesti sementara bagi imigran yang tinggal di negara mereka karena jumlahnya sudah melampaui batas. Negara-negara tersebut yakni Swiss dan Swedia tahun 1970 dan 1972, Jerman pada tahun 1973, Belgia dan Perancis di tahun 1974 (Mascareñas & Penninx, 2016).

Pada tahun 1980-an sifat migrasi Muslim ke Eropa Barat mulai berubah, mereka bukan lagi datang untuk menjadi tenaga kerja, melainkan datang untuk mengungsi akibat konflik dan perang. Banyak dari mereka datang dari Afganistan, Iran, Irak, Lebanon, Somalia, dan bekas Republik Yugoslavia. Memasuki awal 1990-an, diperkirakan total populasi Muslim hanya di Eropa bagian Barat saja mendekati 10 juta jiwa. Imigrasi Muslim di negara-negara Eropa pada tahun tersebut dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) bagian. Di Utara Eropa, imigrasi Muslim didominasi oleh masuknya imigran resmi melalui aplikasi pengungsi, mereka datang tujuan untuk menyelamatkan dari konflik sipil negaranya, lalu menuju perbatasan Eropa untuk mencari peluang lapangan pekerjaan. Sedangkan bagian Eropa Selatan, didominasi oleh masuknya pengungsi ilegal yang memiliki motivasi ekonomi serta keinginan untuk keluar dari konflik sipil di negaranya (François & Souris, 2018).

Dengan meningkatnya jumlah imigran yang datang dari negara-negara mayoritas muslim ke Eropa, mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah populasi muslim dalam di benua ini. Pendataan yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1999 menunjukkan bahwa antara tahun 1989 hingga 1998, Muslim di Eropa meningkat lebih dari 100 persen (Aliyudin, 2008). Sampai awal dekade abad ke-21 sedikitnya telah terdapat 15 juta kaum muslim di Eropa (Pabottingi, Basyar, & dkk, 2008). Sebagian besar Muslim di negara-negara Eropa Barat memiliki prosentase sebesar 2 hingga 6 persen dari populasi. Dibawah ini akan ditampilkan

table dan diagram untuk menunjukkan perkembangan Muslim yang Muslim yang tersebar di sebagian wilayah Eropa dari tahun ke tahun.

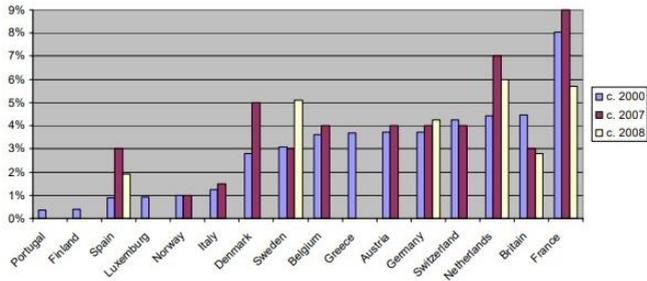
Tabel 3.1 Estimasi Populasi Masyarakat Muslim di Eropa tahun 1950-1990

	1950	1960	1970	1980	1990
Populasi	547.42 4.812	604.42 3.268	655.99 6.572	692.89 9.864	720.75 8.128
Muslim	10.765. 329	13.426. 084	19.918. 426	24.726. 900	31.939. 289
Muslim %	1.97 %	2.22 %	3.04 %	3.57 %	4.43 %

Sumber: (Kettani, 2010)

Tabel diatas memaparkan estimasi polulasi masyarakat muslim di seluruh wilayah Eropa pada jangkauan tahun 1950 hingga 1990. Dalam perkembangannya, populasi muslim setiap sepuluh tahun sekali terus menunjukkan peningkatan, walaupun tidak signifikan tetapi angka terus naik secara perlahan dan pasti. Tahun 1950 Eropa hanya dihuni oleh 10 juta kaum muslim, pada 1990 meningkat tiga kali lipat menjadi 31 juta dan mencakup 4,43 % dari total penduduk di dataran Eropa. Peningkatan populasi penduduk muslim di daratan Eropa berbanding lurus dengan peningkatan jumlah populasinya. Per tahun 1950, Eropa sudah dihuni lebih dari 500 juta jiwa, terus menunjukkan peningkatan hingga mencapai 720 juta jiwa memasuki tahun 1990. Angka itu akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan modernitas yang terus ada pada tubuh Eropa.

Figure 3.1 Prosentase Muslim di Negara-Negara Eropa Tahun 2000, 2007 dan 2008



Sumber: (Kaufmann, 2015)

Gambar diatas menunjukkan prosentase jumlah penduduk muslim yang tersebar pada beberapa negara di Eropa. Negara-negara diatas memiliki prosentase yang berbeda-beda mengenai jumlah penduduk muslim yang tinggal di negaranya pada tahun 2000, 2007 dan 2008. Dapat diketahui bahwa negara-negara diatas memiliki prosentase yang fluktuatif dan cenderung tidak stabil mengenai jumlah masyarakat muslimnya. Beberapa negara menunjukkan peningkatan populasi muslim secara signifikan antar tahun 2000 menuju 2007 seperti pada negara Spanyol, Denmark, Netherlands dan Perancis. Tetapi terdapat juga negara yang tidak menunjukkan hal yang sama, atau bahkan menunjukkan penurunan, seperti Portugal, Fidlandia, Luxemburg dan Inggris. Memasuki tahun 2007 hingga 2008, mayoritas negara Eropa mengalami penurunan jumlah masyarakat muslim seperti Spanyol, Netherlands dan Perancis. Akan tetapi, Swedia justru menunjukkan peningkatan yang signifikan terkait dengan jumlah masyarakat muslim yang ada di negaranya.

Eropa terkhusus pada bagian Barat telah mengalami peningkatan jumlah imigrasi dari seluruh dunia dalam dekade terakhir. Laporan Uni Eropa tahun 2009 tentang imigrasi menunjukkan total 18,5 juta warga negara non-Uni Eropa terdaftar dan 8 juta imigran ilegal tinggal di negara-negara Uni Eropa (Commission Of The European Communities , 2009).

Pada saat yang sama, para imigran yang dahulunya datang tidak untuk menetap, perlahan-lahan menyadari bahwa mereka telah mencapai ‘akar tanah’ di Eropa, yakni menjadi suatu komunitas yang besar. Mereka mulai untuk menyediakan kebutuhan fisik dan ekonomi, membangun infrastruktur ibadah, layanan pendidikan, dan kesejahteraan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak yang menyadari bahwa kembali ke negara asalnya terdahulu tidak akan menjamin kehidupan yang lebih baik (Relevy, 2015).

Permasalahan mulai muncul ketika banyak terjadinya pro dan kontra yang mengakibatkan gesekan antar kelompok. Munculnya komunitas muslim sebagai sesuatu yang permanen adalah realitas sosial yang menjadi pusat perdebatan, lingkungan menjadi tidak aman akibat mulai terjadi tindak kekerasan dan kebencian terhadap Muslim baik verbal maupun non-verbal yang diakibatkan oleh ‘oknum’ individu yang tidak senang dengan kehadirannya. Tindak kekerasan yang mulai muncul tentu akan memicu terjadinya perpecahan yang semakin dalam antara tuan rumah dan “tamu” yang hadir di benua Eropa.

3. Masuk dan Berkembangnya Islam di Perancis

Kedatangan Muslim pertama kali di Perancis terjadi selama berabad-abad yang lalu, setelah pendudukan Bangsa Moor di Spanyol pada abad kedelapan. Beberapa dari mereka menetap di pinggiran kota Toulouse hingga Utara Burgundy. Pada tahun 731, Charles Martel (pimpinan militer) melawan balik penjajah muslim di *Pertempuran Poitiers* atau Pertempuran Tur yang mengakibatkan beberapa muslim melarikan diri dari Reconquista Spanyol dan menetap di sekitaran kota Narbonne dan Béarn. Peristiwa itu bisa dibuktikan dengan adanya sisa-sisa masjid peninggalan abad kedelapan di kota Narbonne. Memasuki abad ke-15, perluasan perdagangan laut membawa Perancis memiliki hubungan dengan Islam lebih jauh lagi di Kekaisaran Ottoman, Afrika Barat, dan Samudra Hindia. Dimulainya ekspansi kekaisaran,

Perancis mulai menguasai negara dengan populasi mayoritas Muslim seperti Mesir tahun 1798, Aljazair tahun 1830, Afrika Barat tahun 1880, Tunisia tahun 1881, Maroko tahun 1912, dan Suriah serta Lebanon tahun 1920 (Laurence & Vaisse, 2006).

Dimulainya migrasi kaum muslim menuju Perancis pertama kali terjadi pada saat Perang Dunia I tepatnya tahun 1914-1918. Kala itu sekitar 70.000 warga Aljazair dan 70.000 warga Maroko datang ke negeri *de Gaul* ini (Pabottingi, Basyar, & dkk, 2008). Dilanjutkan dengan peningkatan secara signifikan setelah terjadinya Perang Dunia II, ketika banyak perusahaan Perancis membutuhkan imigran untuk mengisi kekosongan pada pasar tenaga kerja dengan tujuan rekonstruksi pasca perang. Sejarah kolonialnya di masa lalu membuat sebagian besar datang dari Maroko, Aljazair, Tunisia, Sub-Sahara Afrika dan Turki (Tebbakh, 2007). Gelombang imigrasi tersebut dihentikan dan dibatasi dengan ketat oleh Pemerintah Perancis mengingat pada tahun 1973 hingga 1974 terjadi kemerosotan ekonomi, tetapi disisi lain di akhir tahun 1970-an hingga 1980-an terjadi “reunifikasi keluarga” yang mengakibatkan banyak wanita dan anak-anak bergabung dengan imigran laki-laki dan menetap di Perancis. Reunifikasi keluarga dari semua negara di Eropa menunjukkan pertumbuhan yang cukup besar, 55.000 pada akhir 1960-an menjadi 81.000 pada tahun 1973. Sementara itu, kedatangan pasangan asing meningkat dari 23,000 pada tahun 1990 menjadi lebih dari 60.000 pada tahun 2004 (Laurence & Vaisse, 2006).

Gelombang imigrasi berikutnya adalah kedatangan para pengungsi konflik politik dari Turki setelah kudeta militer serta orang-orang kurdi sebagai pencari suaka pada tahun 1980. Ketika semakin banyak imigran bermukim di Perancis, populasi cenderung akan meningkat. Sejalan dengan bentuk pemerintahan Perancis yang sekuler sehingga menjadikan kepercayaan masuk dalam sektor privat, pemerintah tidak mengumpulkan secara resmi informasi mengenai masyarakat yang beafiliasi kepada Muslim, namun berbagai perkiraan menunjukkan bahwa sekitar 5 hingga 7 juta populasi muslim

hidup di Perancis, yang mewakili 7 % hingga 10 % dari total populasi warga negara Perancis. Populasi Muslim di Perancis terdiri dari imigran legal, warga negara legal, dan beberapa dari mereka juga datang dengan ilegal (Kaufman, 2017).

Pada tahun 1998, (Tebbakh, 2007) mengutip sebuah buku yang ditulis oleh Gilles Couvreur dengan judul “*Musulmans de France: Diversité, Mutations et Perspectives de L’islam Français*” dalam sebuah Report yang ditulisnya. Report itu berisi kutipan Couvreur yang berupaya untuk mempresentasikan data tentang populasi Muslim yang dikategorikan berdasarkan asal geografis mereka (Tabel 3.2). Data tentang imigran didasarkan pada hasil sensus penduduk pada tahun 1990 (Tabel 3.3) yang diterbitkan oleh Badan Statistik Nasional INSEE (*L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques*). Sumber yang digunakan untuk menentukan proporsi warga Perancis bervariasi, mulai dari populasi Muslim dengan kewarganegaraan Perancis termasuk anak-anak imigran, imigran yang telah dilakukan naturalisasi, “Harkis” atau individu yang menjadi anggota tantara Perancis selama Perang Aljazair dan lain sebagainya.

Tabel 3.2 Populasi Muslim Perancis tahun 1998

Grup Populasi	Total	Sub-Total	Perkiraan Jumlah Orang Asing	Perkiraan Jumlah Warga Negara Perancis
Muslim asal Afrika Utara	2.900.000			
- Muslim asal Algeria	--	1.500.000	600.000	900.000
- Muslim asal Maroko	--	1.000.000	600.000	400.000
- Muslim asal Tunisia	--	350.000	200.000	150.000

Muslim asal Turki dan Timur Tengah	350.000		200.000	150.000
Muslim dari Sub-Sahara	250.000			
<i>Total</i>	<i>3.500.000</i>			
Total Muslim Warga Negara Perancis	--		--	2.000.000
Populasi Nasional (1999)	56.625.000		--	--

Sumber: (Couvreur, 1998) & (Tebbakh, 2007)

Tabel 3.3 Proporsi Imigran pada Populasi Nasional tahun 1990 dan 1999

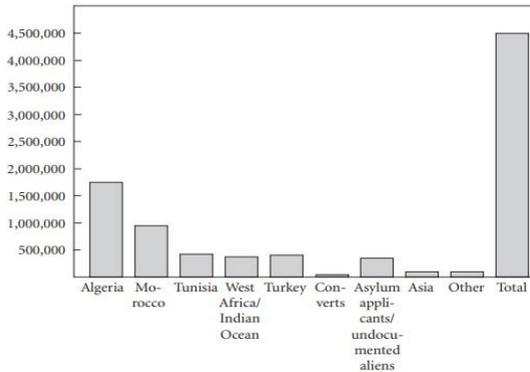
Negara Asal	Proporsi Imigran (%)	
	1990	1999
Algeria	13,3	13,4
Maroko	11,0	12,1
Tunisia	5,0	4,7
Turki	4,0	4,0
Sub-Saharan Afrika	6,6	9,1
Total jumlah imigran	4.165.962	4.306.094
Total Populasi	56.615.155	58.518.395

Sumber: INSEE & (Tebbakh, 2007)

Selanjutnya, (Laurence & Vaisse, 2006) mengutip sebuah buku yang ditulis oleh Alain Boyer dengan judul

“*L’islam en France*” pada tahun 1998 yang didalamnya berisi polling yang di lakukan oleh *Center of political researches of Sciences Po* (CEVIPOF) pada tahun 2001 mengenai jumlah populasi muslim di Perancis berdasarkan negara asal tahun 1998 dengan lebih spesifik.

Figure 3.2 Populasi Muslim di Perancis Menurut Negara Asal tahun 1998



Sumber: (Boyer, 1998) & (Laurence & Vaisse, 2006)

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa populasi Muslim di Perancis didominasi oleh datangnya imigran dari berbagai negara, terkhusus negara yang memiliki hubungan istimewa dengan Perancis akibat kolonialisme terdahulu. Para imigran yang datang memiliki konsentrasi tinggal dan menetap di pusat-pusat kota di Perancis, seperti Paris, Marseille, Lyon dan daerah-daerah pinggiran kota (*banlieues*). Konsentrasi terbesar berada di wilayah Paris (*Ile-de-France*), merupakan rumah bari 35 hingga 40 % dari totap Muslim Perancis. Sebesar 15 hingga 20 % Muslim tinggal di sekitar Marseille dan Nice (wilayah *Provence-Alpes-Côte d'Azur*), daerah Lyon dan Grenoble mencakup 15 %, dan Lille (*Nord-Pas de Calais*) mencakup 5 hingga 10 %.

Tabel 3.4 Kota-kota Perancis dengan Jumlah Populasi Muslim Terbesar

Kota	Perkiraan Jumlah Muslim	Total Populasi di Kota	Muslim menjadi Populasi Lokal (%)
Paris	1.700.000	11.000.000	10-15
Marseille	200.000	800.000	25
Lille	200.000	4.000.000	5
Lyon	150.000	1.200.000	8-12
Roubaix (Lille)	50.000	100.000	50

Sumber: (Agence pour le Développement des Relations Interculturelles, 2000) & (Laurence & Vaisse, 2006)

Secara keseluruhan populasi Muslim yang tersebar di Eropa khususnya di negara Perancis dapat dikategorikan menjadi tiga tatanan sosio-politik, yakni (Mandaville, 2007):

1. **Pluralistik:** Golongan ini cenderung paling nyaman dengan keberadaan berbagai komunitas dan sistem nilai yang berbeda tinggal di negara yang sama serta lebih terbuka terhadap gagasan penafsiran tentang Islam. Dalam hal politik, cenderung memilih dan mendukung parta-partai politik arus utama. Mereka berpendapat bahwa identitas nasional Muslim dan Eropa sama pentingnya, serta mendorong partisipasi aktif warga dalam negara.
2. **Komunitarian:** Golongan ini memungkinkan beragam interpretasi tentang muslim, tetapi hanya

dalam situasi-situasi tertentu untuk dapat bersosialisasi di kalangan Muslim. Terkadang memberikan suara untuk partai-partai arus utama, dan cenderung mempertahankan “hak-hak muslim” karena baginya identitas muslim dipandang sebagai yang utama, sehingga banyak komunitarian yang berusaha untuk mendirikan partai-partai Muslim.

3. **Radikal:** Golongan ini menolak segala bentuk kemungkinan hidup berdampingan dengan non-Muslim dalam pemerintahan yang sama untuk membawa perubahan mendasar (tanpa atau dengan kekerasan) ke tatanan politik yang baru, baik dengan mendirikan negara-negara Islam, atau dengan menghidupkan kembali kekhalifahan global. Golongan ini cenderung memiliki pemahaman yang sempit tentang sumber Islam dan secara aktif mengatur diri mereka sendiri.

Melihat realitas bahwa kondisi sosio-politikal umat Muslim semakin kompleks, Kementerian Dalam Negeri dibawah Pemerintah Perancis mendirikan *Conseil Français de la Culte Musulman* (CFCM - “*French Council of the Muslim Faith*”) pada tahun 2003 dengan tujuan untuk memberikan titik masuk yang terpusat dan menjadi tempat konsultasi serta badan yang menaungi dan mewaliki umat Muslim di Perancis. Badan ini secara resmi didukung oleh Nicolas Sarkozy yang saat itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Mulai dari situ, CFCM sedikit demi sedikit memiliki posisi dalam hubungannya dengan kekuatan politik Perancis, seperti pembangunan Masjid, pasar makanan halal, pelatihan imam, pengembangan perwakilan Muslim di penjara, termasuk juga dalam menetapkan tanggal di bulan Ramadhan (Pont & Ferchiche, 2015).

Conseil Français de la Culte Musulman diorganisasikan oleh 25 Dewan Regional dengan masa jabatan tiga tahun yang dipilih oleh setiap delegasi Masjid yang

jumlahnya ditentukan oleh banyaknya area tempat ibadah. Dewan ini terdiri dari tujuh cabang, yaitu (Mandaville, 2007):

1. *Comité de Coordination des Musulmans Turcs de France* (CCMTF) atau Komite Koordinasi untuk Muslim Turki di Perancis.
2. *Fédération Française des Associations Islamiques d'Afrique, des Comores et des Antilles* (FFAIACA) atau Federasi Perancis Asosiasi Islam Afrika, Komoro dan Karibia.
3. *The Federation "Invitation and mission for the faith and practice"* atau Federasi "Undangan dan Misi untuk Iman dan Praktik".
4. *Fédération Nationale des Musulmans de France* (FNMF) atau Federasi Nasional Muslim Perancis.
5. *Grande Mosquée de Paris* (GMP) atau Masjid Agung Paris.
6. *Union des Organisations Islamiques de France* (UOIF) atau Persatuan Organisasi Islam Perancis.
7. *Rassemblement des Musulmans de France* (RMF) atau Rapat Umum di Perancis.

Setiap cabang memiliki peran dan tugas masing-masing untuk mempererat umat Muslim menjadi satu kesatuan yang selaras serta membantu mengintegrasikan masyarakat muslim dari berbagai kelompok dan golongan untuk melebur dalam satu tatanan negara Perancis yang damai dan universal.

Integrasi perlu dilakukan dalam upaya untuk meminimalisir terjadinya gesekan diantara warga negara asli Perancis dan para pendatang Muslim yang notabennya memiliki perbedaan. Proses integrasi memungkinkan terjadinya timbal balik dua arah yang diharapkan mampu untuk tercapainya prinsip Republik Perancis yang *liberté, égalité, dan fraternité* (kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan). Dalam konteks ini, Perancis memiliki program yaitu *Contrats d'accueil et de l'indre* (*Welcome and Integration Contracts*) pada tahun 2003 yang diprakarsai oleh Sarkozy selaku Menteri Dalam Negeri

Perancis. Dibawah program ini, para pendatang baru mendapatkan pengajaran kewarganegaraan, termasuk pengajaran bahasa lokal Perancis. Selajutnya, para imigran harus menandatangani “kontrak integrasi”, dimana mereka diminta untuk berkomitmen dalam menghormati nilai-nilai dasar Republik. Oleh karena itu, tanggung jawab besar di terima oleh para migran untuk mengintegrasikan dirinya kedalam budaya Perancis yang universal (Brown, 2019).

Dalam perjalanannya, proses integrasi tidak selalu sesuai dengan harapan. Tingginya konsentrasi geografis yang kuat dari umat Muslim di bagian kota yang secara sosial kurang beruntung. Imigran Eropa memikmati tingkat pekerjaan yang tinggi (79%), sementara Perancis berjuang untuk mengurangi angka pengangguran. Sejumlah 4,4 juta orang Arab atau Afrika tinggal di “*banlieues*” atau daerah kumuh dimana kemiskinan dan kejahatan merajalela. Peneliti mengungkapkan bahwa 3 dari lima anak di *banlieues* tumbuh dalam kemiskinan (Abdelkader, 2017). Itulah salah satu alasan yang menyebabkan mereka sulit untuk membaur dengan masyarakat lokal. Oleh karenanya, banyak ditemukan laporan mengenai bukti praktik diskriminasi serta adanya persepsi-persepsi negatif diantara imigran muslim yang akan dijelaskan penulis dalam kerangka “Fenomena Islamophobia di Perancis” di bawah ini.

B. Fenomena Islamophobia tahun 90-an hingga 2000-an

1. Eropa

Secara historis, pengakuan dan pelembagaan multikulturalisme di Eropa dimulai dengan terbitnya “*Race Relations Act*” atau Undang-Undang Hubungan Ras pada tahun 1976 yang melarang segala bentuk diskriminasi. Kerangka hukum berlanjut dengan penerapan Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar (*European Convention for the Protection of Human Rights and*

Fundamental Freedoms) yang diadopsi oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1998, memiliki nilai fundamental untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan diskriminasi, terlebih pada persoalan agama dan kepercayaan, serta kebebasan untuk mengubah kepercayaan, melaksanakan ibadah, praktik dan pengajaran (Aras, 2007).

Telah terbitnya landasan hukum yang jelas mengenai larangan untuk bertindak diskriminatif tidak berbanding lurus dengan realitas yang terjadi. Tidak dapat dipungkiri bahwa persoalan dan perdebatan tentang modernitas, kaidah-kaidah hukum, gender, dan islam telah berlangsung selama dua abad yang lalu (Meij, 2003). Terus berkembang hingga beberapa tahun terakhir sebuah perdebatan muncul tentang implikasi komunitas Muslim Eropa, kebijakan domestiknya, dan hubungan luar negeri Eropa dengan dunia Muslim. Beberapa pengamat berpendapat bahwa budaya Islam bertentangan dengan tradisi Eropa seperti menghormati kebebasan berekspresi, sekularisme, dan hak-hak perempuan. Kekhawatiran muncul bahwa populasi Muslim yang terus tumbuh di Eropa akan secara signifikan mengubah politik dan masyarakatnya dalam beberapa dekade mendatang. Beberapa yang mendukung pandangan ini menyatakan bahwa ini adalah “kemunduran Eropa” dan “Islamisasi Eropa” (Archick, Belkin, & dkk, 2011).

Kehadiran Islam dan Muslim di Eropa khususnya bagian Barat telah menjadi fokus mengenai bagaimana mengelola keanekaragaman yang kian berkembang di benua ini. Sejak serangan teroris besar di New York, Madrid, dan London, Islam dan Muslim dianggap sebagai ancaman keamanan oleh populasi mayoritas Eropa. Selain itu, Muslim di Eropa umumnya digambarkan sebagai kelompok yang tidak layak dan tidak mau diintegrasikan, kelompok yang menempatkan nilai-nilai agama di atas prinsip-prinsip demokrasi liberal Barat, dan secara agresif mencoba mendominasi ruang publik Eropa (Fleischmann, 2011).

Dalam beberapa kasus memang terjadi kontak fisik seperti di sekolah, tempat kerja atau di lingkungan tempat tinggal yang memungkinkan imigran Muslim dan orang asli Eropa saling mengenal sekaligus untuk menghilangkan sedikit demi sedikit citra negatif yang melekat pada mereka. Namun demikian, citra negatif memang tetap saja mendominasi sebagian warga Eropa. Para imigran dengan konsentrasi tinggi di lokasi tertentu, dengan adat dan pakaian tradisional sekaligus berbicara menggunakan bahasa ibu membangkitkan perasaan tidak nyaman dan takut di antara masyarakat Eropa. Beberapa ilmuwan dan sarjanawan memiliki pandangan bahwa mayoritas masyarakat di Eropa saat ini mengalami gejala “islamophobia”, yakni secara singkat didefinisikan sebagai suatu tindakan permusuhan tidak berdasar terhadap umat islam, yang mengarah pada terjadinya tindakan diskriminasi (Relevy, 2015).

Di Eropa, organisasi anti-Muslim sangat aktif beroperasi setiap hari dalam konteks lokal maupun global, baik LSM, Yayasan, hingga lembaga penelitian. Kelompok-kelompok tersebut berjalan dengan sangat terstruktur dan stabil dalam menyebarkan gagasan palsu dan berbagai macam teori konspirasi dalam ruang virtual dan fisik, bahkan juga memberikan tekanan politik kepada pihak setempat yang berwenang mengenai pembatasan hak-hak umat Muslim, pencabutan gerak Muslim di ruang publik, melaporkan perilaku Muslim yang tidak konvensional bahkan berpartisipasi dalam demonstran menentang perayaan hari besar umat Muslim (Idul Fitri dan Idul Adha).

Meskipun tindakannya sangat bervariasi tergantung konteksnya, terdapat 2 (dua) elemen utama tindakan mereka yang dapat diidentifikasi. *Pertama*, menciptakan desas-desus yang menimbulkan kepanikan moral dan *islamo-hysteria* untuk mempengaruhi ketentuan-ketentuan politik dan putusan pengadilan. *Kedua*, organisasi tersebut saling berhubungan dan berpartisipasi dalam jaringan dan federasi nasional hingga internasional untuk menyebarkan tema-tema islamophobia

yang tak jarang dilakukan dengan bantuan media sosial (Perocco, 2018).

Dibawah ini terdapat tiga aktor utama yang memiliki andil besar dalam meluasnya fenomena islamophobia di Eropa, yakni (Perocco, 2018):

a. Partai Sayap Kanan

Partai sayap kanan ‘baru’ pasca industri sedang berkembang dan memainkan peran kunci dalam *euphoria* dan berkembangnya islamophobia anti-imigran di Eropa. Dalam dua dekade terakhir, partai-partai telah meningkat jumlahnya dan berhasil mengambil simpati masyarakat serta memperkuat pengaruh politiknya secara luas dan strategis. Banyak diantaranya terpilih untuk masuk parlemen dan menjadi bagian dari pemerintah. Slogan “supremasi kulit putih”, rasa nasionalisme dibangun dengan menggambarkan imigrasi Muslim sebagai ancaman global, mendapat dukungan dari berbagai sektor masyarakat. Setiap partai memiliki slogan dan ciri khas kampanye yang berbeda-beda, tetapi memiliki satu kesimpulan yang sama yakni cenderung kepada xenophobia dan islamophobia.

Terdapat contoh, partai *Schweizerische Volkspartei (SVP)* di Swiss menjadi salah satu kekuatan politik sejak tahun 1999 dan menjadi partai mayoritas sejak tahun 2003 dan terkenal memiliki orientasi anti-imigrasi. Di Austria, sejak tahun 1999, *Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)* yang dipimpin oleh Norbert Hofer sekaligus menjadi kandidat Presiden dalam pemilu 2016 menjadi salah satu partai terkuat dengan islamophobia sebagai slogan kampanye. Partai anti-imigrasi dan anti-islam, *Alternative für Deutschland (AFD)* di Jerman, memperoleh suara yang cukup tinggi dalam pemilu regional, sekitar 24% di Sachsen-Anhalt

dan 20% di Mecklenburg-Vorpommern pada tahun 2016. Yang terakhir yakni *Front Perancis Nasional* yang memperoleh 25% suara dalam pemilihan Eropa tahun 2014 dan menjadi peringkat kedua dalam pemilihan Presiden tahun 2017, secara tradisional adalah anti-imigran dan anti-muslim.

b. Karya Best-Sellers

Selama lebih dari satu dekade, karya publikasi yang mengandung *stereotip* dan mempromosikan teori konspirasi tentang imigrasi muslim mulai populer dan memainkan peran penting dalam penyebaran tema-tema kunci islamophobia di antara pembaca, bahkan sebelum mereka bertemu langsung dengan para pendatang. Biasanya mereka membidik pembaca umum dengan membuat referensi dengan menarik argumen dan istilah yang problematis mengenai suatu tema. Salah satu buku yang membawa pengaruh cukup besar, yakni karya Thilo Sarrazin dengan judul “*Deutschland schafft sich ab*” di tahun 2010 yang membawa kesuksesan besar dengan terjual lebih dari satu juta kopi. Menurut penulis dalam bukunya, imigran Muslim akan memiliki keuntungan demografis yang mengakibatkan penurunan genetik dan budaya ras Jerman, akibatnya kesejahteraan Jerman, kecerdasan rakyat Jerman, dan bangsa Jerman terancam oleh infiltrasi demografis imigrasi muslim.

c. Media Massa

Media massa memiliki peran yang tidak kalah berpengaruh dari kedua aktor yang sudah disebutkan diatas. Selama tahun 90-an, artikel pers dan TV tentang imigrasi Muslim belum begitu banyak, dan beberapa dari mereka belum menunjukkan sisi negatif dan bias, bahkan cenderung memiliki sifat terbuka. Namun tahun

2000-an berubah secara drastis, beberapa media massa di Eropa selaras mengangkat tentang isu imigran muslim yang didefinisikan sebagai masalah global. Perspektif dibangun dengan penayangan seputar imigran yang cenderung menyudutkan, imigran Muslim secara sistematis dikaitkan dengan fundamentalisme dan terorisme. Media massa secara tidak langsung telah mengubah kelompok muslim menjadi musuh publik nomor satu.

Menurut laporan yang baru-baru ini dikeluarkan oleh *EU's Fundamental Rights Agency*, diskriminasi terhadap Muslim Eropa meningkat, dengan dua dari lima atau setara dengan 40% mengatakan bahwa mereka telah menghadapi perlakuan yang tidak adil ketika dalam pekerjaan atau mengakses layanan publik, seperti pendidikan dan perawatan kesehatan. Selanjutnya, 30% responden dalam survei mengatakan bahwa mereka telah dihina dan 2% diantaranya telah diserang secara fisik dalam 12 bulan sebelum survei dilakukan pada akhir tahun 2015 dan awal 2016 yang melibatkan 10.500 Muslim di 15 negara termasuk Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Swedia dan Inggris. Sebagian besar dari responden mengatakan bahwa penyebab terjadinya perlakuan tidak adil yakni karena nama, warna kulit atau penampilan mereka. Hampir 40% wanita yang mengenakan jilbab atau *niqab* di depan umum merasa bahwa itulah penyebab mereka mendapat perlakuan tidak adil saat melamar pekerjaan, serta lebih dari 30% wanita yang mengenakan pakaian tradisional atau keagamaan mengatakan mereka telah dilecehkan menggunakan gerakan atau komentar ofensif (Organisation of Islamic Cooperation, 2018).

Walaupun upaya integrasi sudah dilakukan, namun pada kenyataannya tidak selalu dihargai dan berjalan dengan semestinya. Sebagian warga diberikan

pertanyaan mengenai Muslim, dan 20% diantaranya mengatakan tidak ingin memiliki tetangga seorang Muslim. Kewaspadaan terhadap islam tertinggi berada pada negara Austria dengan prosentase 28% dan yang terendah yakni negara Perancis dengan 14%. Muslim yang mengaku beragama dan menjalankan agamanya dengan taat juga mengalami diskriminasi di pasar tenaga kerja, banyak dari mereka yang sulit untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi (Vopel & El-Menouar, 2017).

2. Perancis

Islam di Negara Perancis dianggap sebagai topik yang mengundang perdebatan, banyak yang menganggap bahwa Islam sulit untuk dikritik, sementara seseorang yang mengkritik Islam di klaim sebagai islamophobia. Wartawan Perancis seperti Ilya U. Toper dan Alvin H. Rosenfeld mengklaim bahwa islamophobia adalah strategi untuk mengutuk segala bentuk tindakan kritik terhadap Islam. Islam dinilai memiliki “status kebebasan”, yakni suatu hak istimewa yang tidak dimiliki oleh agama lain. Selanjutnya, menurut Michel Hollibecq seorang sarjana Perancis yang terkenal, seseorang tidak lagi memiliki kebebasan berbisara di Perancis karena ketatukan muncul dari tuduhan rasis atau islamophobia (Ulger & Benitez, 2017).

Islamophobia di Perancis memiliki beberapa kekhususan dan dimulai pada saat pendudukan Perancis di Aljazair pada tahun 1830 (Ameli, Merali, & Shahghasemi, 2012). Misalnya program *Code de l'indigénat* tahun 1865 yang memberikan kewarganegaraan Perancis kepada Aljazair tetapi mengharuskan mereka untuk melepaskan agama mereka untuk menerima kewarganegaraan (Lebourg, 2016). Sementara rasisme yang secara spesifik menargetkan imigran dan umat Islam adalah karakteristik kebijakan Perancis pada abad ke-20. Kesalahpahaman tentang tampilan agama semakin meningkatkan permusuhan Perancis terhadap Islam. Tampilan

islam yang mecolok ditafsirkan secara berlebihan sebagai bukti semangat keagamaan baru.

Ketika pada awal 1980-an, imigran yang datang mulai membangun Masjid, membuka toko makanan halal, dan mengklaim tanah makam untuk umat Muslim. Mayoritas penduduk Perancis termasuk para intelektual khawatir akan ‘kembalinya Islam’, mengingat pada masa lalu Islam pernah menguasai Eropa. Sebenarnya kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan, para imigran yang pada awalnya berniat untuk tidak tinggal permanen, memutuskan menetap di Perancis dengan berbagai alasan. Integrasi coba dilakukan, mereka mulai menganggap dirinya sebagai bagian dari masyarakat Perancis. Tetapi usaha yang dilakukan pada kenyataannya menemui banyak hambatan. Banyak masyarakat Perancis gagal untuk mengenali perbedaan budaya dan sosial diantara umat Islam, dan secara kebetulan terjadi peningkatan gejolak politik di dunia Arab dan Muslim. Dalam kebingungannya, banyak warga Perancis yang mengaitkan Islam yang notabennya hidup damai dengan gerakan fundamentalisme.

Peristiwa diperparah dengan terjadinya tragedi WTC pada 11 September 2001 yang menyita banyak perhatian masyarakat di seluruh dunia tak terkecuali Negara Perancis. Tragedi tersebut secara langsung memberikan dampak yang signifikan terhadap populasi Muslim, mengingat Islam dicitrakan sebagai aktor utama yang menyebabkan tragedi tersebut terjadi. Mulai saat itu, julukan Islam adalah teroris mulai berkembang pesat. Berbagai negara mulai mengeluarkan kebijakan yang ketat terhadap Islam. Ketakutan yang berlebih pada teroris dan Islam mulai meningkat secara signifikan. Menurut data *Europheres*, Islamophobia semakin meningkat pada enam tahun terakhir ini (Ismoyo, 2016).

Diskriminasi dan berkembangnya persepsi negatif terhadap Muslim telah menjadi sesuatu yang “alami” di Perancis. Politisi Perancis seperti Jacques Chirac dan Jean-Pierre Chevenement terkadang membuat pernyataan yang

mendukung persepsi negatif tentang Muslim, mereka mengatakan pernyataan bahwa Muslim suka berpoligami dan bermalas-malasan. Pernyataan itu didukung sebagai akibat dari Partai Sayap Kanan Perancis yang memiliki kecenderungan islamophobia (Ulger & Benitez, 2017). Tindakan dan wacana terhadap Muslim cenderung meningkat dalam beberapa konteks. Terkadang tuduhan dan tanggapan negatif kepada Islam merupakan elemen penting yang digunakan untuk memperkuat citra publik dan kredibilitas partai atau politisi.

Dalam hal ini, banyak Partai Sayap Kanan dan politisinya memiliki wacana anti-Muslim dan imigran yang eksplisit. Target utamanya yakni orang-orang berpendidikan rendah dan kelas pekerja sebagai pendukung utama partai-partai ini. Di contokan, ketika Sarkozy menjalankan pemilihan umum kembali pada tahun 2012, pemerintah Perancis mengambil langkah-langkah yang sangat ketat terhadap komunitas Muslim karena serangan di Toulouse dan Montauban. Dibentuklah citra “melawan islamisme radikal”, dengan meningkatkan kontrol terhadap imam dan tempat ibadah (Masjid). Ini adalah salah satu strategi yang digunakan untuk mendukung citra Sarkozy sebagai pemimpin yang kuat dan mampu menghalau musuh di Republik Perancis (Ulger & Benitez, 2017).

Selain dalam ruang lingkup politik, islamophobia di Perancis juga terbagi kedalam beberapa jenis peristiwa, dimana setiap peristiwa tentu memiliki target yang berbeda-beda. Dibawah ini akan dijelaskan cakupan peristiwa islamophobia di Perancis, diantaranya:

a. Kejahatan Rasial (rasisme)

Menurut statistik resmi, orang-orang yang berasal dari Afrika Utara (sebagian berasal berlatar belakang Muslim) adalah objek mayoritas kejahatan rasial yang diklasifikasikan sebagai tindakan “rasis” oleh pihak berwenang. Lembaga *Collectif Contre*

l'Islamophobie en France secara resmi melaporkan terdapat 53 tindakan berindikasi kebencian (termasuk kekerasan) pada tahun 2005, 54 insiden tahun 2006, dan terjadi kenaikan 20 % pada tahun 2007, setara dengan terdapat 65 tindakan semacam itu (Stahnke, LeGendre, & dkk, 2008).

Pada tahun 2013, Departemen Luar Negeri A.S. mengemukakan laporan bawa penegak hukum mencatat sekitar 226 kejahatan kebencian berindikasi anti-Muslim meningkat 11,3 % dari tahun sebelumnya dengan target mayoritas terhadap wanita. Sementara tahun 2014 tercatat 133 laporan mengenai tindak kejahatan rasial dan lebih dari 400 insiden kejahatan terhadap Muslim di tahun 2015. Komisi Hak Asasi Manusia Nasional Perancis (*Commission Nationale Consultative de Droits de l'Homme*) menyatakan bahwa peningkatan dalam kejahatan rasial anti-Muslim meningkat 223 % (Abdelkader, 2017). Kejahatan termasuk juga tindakan pelemparan bahan peledak pada Masjid di Aix-les-Bains, tembakan di Port-La-Nouvelle, serta pada ruang shalat yang ditemukan kepala babi hutan dan isi perutnya di Corsica (Hardy, 2017).

b. Hambatan pada tempat ibadah

Terdapat hambatan secara langsung berupa perusakan-perusakan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti pada peristiwa 20 April 2008, Masjid Al-Salam dihancurkan setelah dibakar di Toulouse. Penyidik dan petugas penyelamat menyimpulkan bahwa itu adalah tindakan pembakaran yang disengaja. Pada akhir Mei, polisi menangkap delapan orang sehubungan dengan serangan tersebut (Stahnke, LeGendre, & dkk, 2008).

Hambatan selanjutnya dilalui Muslim Perancis berkaitan dengan proses pembangunan tempat ibadah. Di tengah kontroversi nasional, pengadilan banding Perancis memutuskan pada Juni 2012 untuk mengizinkan pembangunan Masjid dengan sekala besar di selatan kota Marseille. Putusan ini menuai polemik karena secara otomatis membatalkan keputusan administrasi lokal Marseille yang telah menghentikan pembangunan tempat ibadah menyusul banyak keluhan dari penduduk daerah yang berpendapat bahwa Masjid tidak sesuai dengan lingkungan perkotaan di sekitarnya. Sebagai kompromi terhadap masyarakat sekitar, Masjid akhirnya menggunakan lampu biru yang “berkedip-kedip” sebagai tanda waktu shalat sekaligus menggantikan suara adzan (Abdelkader, 2017).

c. Diskriminasi pada sektor pendidikan

Hidup dalam satu tatanan negara yang universal memang memiliki tantangan yang beraneka ragam, seperti halnya yang berkenaan dengan pakaian. Setiap individu boleh mengekspresikan dirinya menggunakan pakaian yang paling nyaman sesuai keinginan dengan catatan tidak melanggar ketentuan hukum masing-masing negara. Dalam hal ini, Negara Perancis mendeklarasikan negaranya sebagai negara sekuler yang melarang penggunaan simbol-simbol keagamaan tertentu dihadapan publik serta menjunjung tinggi kebebasan (*laïcité*), dihadapkan dengan tantangan yakni Perancis juga rumah bagi para pendatang dengan berbagai latar belakang yang ada, seperti salah satu contohnya wanita Muslim menggunakan *hijab* atau *niqab* jika bepergian adalah syariat yang harus dijalankan.

Sebagai tanggapan atas tantangan tersebut, pemerintah mengorganisir sebuah Komisi investigasi yang dipimpin oleh Bernard Stasi pada tahun 2003,

dengan tujuan untuk memastikan bahwa sekularisme diterapkan secara nyata dalam praktiknya. Laporan Komisi Stasi menghasilkan sejumlah rekomendasi yang dianggap kontroversial, diantaranya adalah bahwa pemerintah harus melarang pemakaian simbol agama yang “mencolok” di sekolah. Simbol-simbol tersebut diantaranya salib berukuran besar, *kippah* Yahudi, dan kerudung atau *hijab* Muslim. Rekomendasi ini di didasarkan pada dua alasan, yakni untuk menegakkan prinsip sekularisme dan menghindari pemaksaan keluarga Muslim terhadap beberapa perempuan yang tidak ingin menggunakan kerudung (ICAAD, 2014). Pemerintah beranggapan bahwa penutup kepala atau *hijab* merupakan salah satu kendala utama untuk mencapai kesetaraan diantara pria dan wanita, terlebih merupakan serangan terhadap prinsip *laïcité*.

Presiden Chirac memilih untuk bertindak berdasarkan bagian dari laporan yang telah dihasilkan oleh Komisi Stasi. Dengan demikian, pada tahun 2004 Badan Legislatif Perancis memberlakukan Undang-Undang yang melarang penggunaan simbol keagamaan di sekolah-sekolah. Pengesahan Undang-Undang tersebut berdampak pada mengusiran anak-anak minoritas yang kebanyakan (tetapi tidak secara khusus) gadis-gadis Muslim. Surat kabar Perancis *La Monde* melaporkan bahwa pada tahun pertama dari implementasi Undang-Undang tersebut, 47 siswa dikeluarkan dari sekolah, dan 96 lainnya secara sukarela memilih untuk meminggalkan sekolah dan tidak kembali (ICAAD, 2014). Peristiwa ini mengundang perhatian dari beberapa LSM, termasuk *International Center for Advocates Against Discrimination* (ICAAD) dan *Human Right Watch* (HRW), mereka meminta Perancis untuk mencabut atau mengamandemen UU tersebut, namun rekomendasi tersebut ditolak.

Selain yang disebutkan diatas, hambatan terjadi pada kondisi sosial-ekonomi yang mempengaruhi aplikasi pendidikan siswa minoritas pada sekolah atau universitas bergengsi. Kendala geografis dan psikologis mempengaruhi pilihan sekolah yang diambil. Mayoritas dari mereka berpendapat bahwa siswa kelas menengah hingga rendah cenderung memiliki pencapaian yang rendah. Selanjutnya, sistem pendidikan Perancis juga telah dikritik karena praktik-praktik diskriminatifnya. Sebagai contoh, lembaga Pendidikan Perancis menunjukkan prasangka negatif terhadap anak-anak Aljazair yang mengakibatkan terjadinya tindakan diskriminatif. Beberapa anggota staf sekolah menurunkan siswa-siswa tersebut ke kualifikasi kejuruan seperti CAP/BEP sehingga membatasi kerja mereka di masa depan. Selain itu, sekolah sering dibedakan secara etnis dan memberikan dukungan yang kurang untuk tingkat pencapaian murid terutama Muslim. Di tingkat Universitas, keberadaan ‘bias rasial’ dalam proses penerimaan siswa baru masih ditemukan, mengakibatkan dibatasinya kesempatan bagi para siswa untuk masuk universitas berstatus baik (Naseem, 2016).

d. Diskriminasi pekerjaan

Dari total populasi imigran non-Eropa di Perancis, bagian terbesar yang datang yakni dari negara-negara mayoritas Muslim dan anak-anaknya. Fenomena ini berbanding lurus dengan sulitnya menemukan celah pada dunia pekerjaan yang mengakibatkan Muslim Perancis mengalami tingkat pengangguran yang tinggi, mereka harus berjuang untuk mendapatkan pekerjaan paruh waktu atau dalam jangka waktu yang panjang. Ketika pertama kali diterima, pekerja (terutama laki-laki) terbatas pada pekerjaan manual dan tidak terampil, sehingga

menempatkan mereka di bagian bawah herarki sosial (Naseem, 2016). Mereka dipekerjakan pada konsentrasi pabrik, konstruksi, industri otomotif, dan lain sebagainya. Menurut Studi Stanford tahun 2010, Muslim Perancis menghadapi diskriminasi pada sektor ketenagakerjaan dengan prosentase yang tinggi, dibandingkan dengan kelompok Kristen yang menerima dua kali lebih banyak peluang daripada Muslim.

Di tempat kerja, diskriminasi lebih mungkin terjadi kepada perempuan. Sebigain besar dipekerjakan di sektor semi-terampil dan tidak terampil seperti tekstil dan jasa (pembersihan). Banyak pekerja wanita datang dari Aljazair. Terdapat empat penyebab rendahnya tingkat pekerjaan di kalangan perempuan yakni, *pertama*, kurangnya kompetensi bahasa, *kedua*, kurangnya kualifikasi pendidikan yang relevan atau tinggi, *ketiga*, usia saat masuk pasar kerja, dan yang keempat, memiliki tanggungan anak-anak. Dengan demikian, baik faktor pendidikan dan yang berkaitan dengan diskriminasi gender masih membatasi ruang gerak pekerja perempuan (Naseem, 2016).

Selain itu, ditemukan fakta melalui sebuah *Discussion Paper* dari *The Institute for the Study of Labor* (IZA) yang membandingkan perusahaan-perusahaan Perancis yang mengevaluasi CV (*Curriculum Vitae*) atau riwayat hidup dari pelamar Muslim Senegal dan Kristen Senegal yang memiliki kemampuan yang setara. Ditemukan fakta bahwa terdapat diskriminasi Muslim Senegal yang diketahui mengalami tingkat panggilan balik untuk mengikuti wawancara kerja yang rendah. Selain itu, ditemukan juga perbedaan pendapatan antara rumah tangga Muslim dan Kristen Senegal yang berjumlah 17 % dari rata-rata pendapatan warga Perancis. Hasil ini menunjukkan bahwa diskriminasi pada pasar tenaga

kerja bagi Muslim memang benar adanya (Adida, Laitin, & Valfort, 2013).

C. Komitmen Presiden Francois Hollande pada tahun 2015-2016

Francois Hollande merupakan Presiden ke-24 yang memimpin Republik Perancis. Beliau menjadi sangat berbeda diantara pemimpin-pemimpin Perancis yang lain karena Hollande dijuluki sebagai “*Presiden Muslim Pertama*” dari Perancis. Tahun 2012 beliau menang telak dan mendapatkan 93% suara dari mayoritas Muslim Perancis dalam pemilihan Presiden babak kedua. Menurut media online Perancis *La Vie*, perhitungan terakhir menunjukkan Hollande meraup 1,7 juta suara dari 2 juta umat Muslim yang memberikan suaranya dalam pemilu. Sebelumnya, Perancis dipimpin oleh Nicolas Sarkozy yang dikenal selalu mengukuhkan sekularisasi di Perancis sebagai hal yang utama dan tak sering juga berkutut dengan masalah-masalah sensitif yang berkaitan dengan keberadaan imigran dan muslim di Perancis sering menimbulkan kontroversi dikalangan warga negara (Marzuki, 2012).

Keduanya disandingkan dalam pemilihan umum tahun 2012 yang dimenangkan oleh Presiden Hollande. Beliau memiliki orientasi yang sangat berbeda dengan Sarkozy, Hollande menyampaikan kampanyenya di Perancis dengan model yang ramah, lembut, dan lebih inklusif. Dalam struktur pemerintahan yang dibangun Presiden Hollande, beliau menunjuk dua dari anggota kabinetnya adalah seorang Muslim, yaitu Najat Vallaud-Belkacem, lahir di Maroko, dan Yamina Benguigui, seorang asli Aljazair, yang kedua-duanya adalah perempuan. Dengan banyaknya mayoritas umat Muslim yang memilih Hollande dan terdapat representasi Muslim di kabinet, banyak harapan dari kelompok Muslim untuk dapat menyuarakan pendapat-pendapatnya (Marzuki, 2012).

Perancis sebagai penjamin nilai-nilai demokrasi liberal dan universal hadir dalam setiap kebijakan luar negeri kontemporer. Mengingat bahwa tatanan citra diri (*self-image*) yang dibangun Perancis sangat bergantung pada peran perintisnya dalam hal Hak Asasi Manusia dan Sipil, maka tidak heran bahwa tema itu selalu diangkat pada pemerintahan Hollande untuk memperkuat citra negara. Beliau mengungkapkan,

“France wants to be exemplary, not to give lessons but because it is its history, it is its message. Exemplary when it comes to carrying the fundamental freedoms, that’s its combat, that’s its honour too (Rein, 16).”

Perancis ingin menjadi negara teladan bukan untuk memberi pelajaran bagi yang lainnya, tetapi memang didasarkan pada sejarah. Teladan dalam hal membawa kebebasan yang mendasar bagi setiap individu, Perancis berjuang dan menjadikannya sebagai sebuah kehormatan.

Namun demikian, yang juga penting yakni preferensi Perancis atas kerja sama multilateral yang turut membantunya dalam melaksanakan misi perdamaian. Perancis membutuhkan PBB untuk berada di jantung pemerintahan global. Hollande mengatakan,

“France does it because it is a permanent member of the Security Council and because its role is to act, not to obstruct. France does it because it has an idea, a grand idea of the world, one that it has always carried throughout history, freedom, democracy, justice. Because France has but one goal for its policies: peace. And, because France speaks to all stakeholders. Because France is an independent nation that respects the law... That is why I believe in the United Nations and that is also why I, with France, carry a universal message (Rein, 16).”

Perancis sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB selalu bertindak dengan gagasan-gagasan besar dunia yang selalu dibawa sepanjang sejarah, yakni kebebasan, demokrasi dan keadilan. Karena Perancis memiliki satu tujuan untuk kebaikannya, tidak lain dan tidak bukan adalah perdamaian. Bersama PBB, Hollande memiliki keyakinan untuk terus membawa pesan-pesan universal bagi seluruh rakyat Perancis.

Selanjutnya, pesan universal Perancis juga didasarkan pada konsepsi Eropa. Visi Eropa yang menjadi tolak ukur Perancis adalah menjadi salah satu contoh bagi dunia tentang *union* atau Serikat yang mengulurkan tangannya kepada negara-negara yang berada dalam garis kemiskinan, menderita kelaparan, terdampak wabah penyakit, dan juga Eropa yang memerangi fanatisme, intoleransi dan kediktatoran. Maka dari itu, Perancis menjelma menjadi bangsa yang sangat menemipatkan nilai-nilai demokrasi liberal dan universal dalam barisan terdepan.

Presiden Francois Hollande sangat mendukung terciptanya tatanan Negara Perancis yang damai, menjunjung nilai-nilai demokrasi, pluralisme, serta menghargai seluruh kelompok dan entitas yang hidup berdampingan di Perancis. Dibuktikan dalam banyak kesempatan, beliau menyampaikan pidato yang berisi dengan tegas dukungannya untuk demokrasi, keragaman budaya dan kepercayaan, kebebasan, dan lain sebagainya, baik dalam acara kenegaraan atau saat menghadiri sebuah *Conference* yang diikuti oleh banyak negara sahabat dan organisasi internasional.

Pada Januari tahun 2015, Presiden Hollande memberikan sebuah pidato untuk memberikan respon atas terjadinya teror besar di Perancis yang membuat semua perhatian tertuju pada Muslim akibat kejadian tersebut. Beliau sampaikan bahwa "*French Muslims have the same rights as all other French*", "*We have the obligation to protect them*". Disaat seluruh warga negara tertuju pada Muslim, karena diduga menjadi aktor utama atas peristiwa tersebut, Hollande memberikan *statement* bahwa Muslim Perancis memiliki hak

yang sama seperti warga Perancis lainnya, dan mereka harus dilindungi. Francois Hollande juga menambahkan bahwa Islam radikal telah membawa kontradiksi, kemiskinan, ketidakesetaraan, dan konflik. Dan merekalah korban dari fanatisme, fundamentalisme, dan intoleransi. Presiden Hollande bersumpah bahwa negaranya akan melindungi semua agama. Dan ketika beliau berbicara di *Arab Wolrd Institude*, Presiden Hollande mengatakan bahwa Islam sangat *compatible* atau sesuai dengan demokrasi (BBC News, 2015).

Selanjutnya, Francois Hollande menyampaikan pidatonya di Forum Pemimpin Negara pada 16 dan 17 November 2015 yang mempertemukan Kepala Negara dan Pemerintahan dari seluruh dunia dalam acara Konferensi Umum UNESCO ke-38 untuk memperingati hari jadi UNESCO yang ke 70 tahun. Dalam acara tersebut, Hollande memberikan pidatonya,

“I wished to be present at the General Conference because you stand for the unity of all cultures of the world. [...] And what better place to affirm the need to hold fast than here, at UNESCO, an institution which was born of a Utopia to unite the whole of humanity through science, education and culture and which found a welcoming home in Paris (UNESCO ORG, 2015).”

Dalam pidatonya beliau tegas mengatakan *“I wished to be present at the General Conference because you stand for the unity of all cultures of the world”*, yang jelas mengindikasikan bahwa beliau turut ikut mendukung persatuan semua budaya di dunia tanpa pengecualian. Ditambahkan, *“and what better place to affirm the need to hold fast than here, at UNESCO, an institution which was born of a Utopia to unite the whole of humanity through science, education and culture and which found a welcoming home in Paris”*, yang mengandung pemahaman bahwa UNESCO merupakan tempat yang tepat untuk menyatukan seluruh umat manusia melalui ilmu,

pendidikan, dan budaya, serta Paris merupakan ‘rumah’ yang nyaman untuk organisasi tersebut. Presiden Hollande mendukung penuh persatuan budaya di seluruh dunia, serta Perancis merupakan rempat yang ramah untuk UNESCO.

Selain itu, beliau juga memuji peran penting UNESCO dalam melindungi warisan budaya dan keanekaragaman budaya.

“Yes, UNESCO is the moral conscience of humanity. What underpinned its foundation was the promotion of the diversity of cultures, a diversity based on the idea that culture links people to their history and to their territory; a diversity anchored in the recognition of the equal dignity of cultures, as every people has a special message to bring to the world; a diversity which promotes pluralism of opinion and belief; a diversity which makes education a driver of universal emancipation (UNESCO ORG, 2015).”

Beliau menambahkan bahwa yang menjadi pondasi dari UNESCO adalah promosi keanekaragaman budaya, keanekaragaman berdasarkan gagasan bahwa budaya menghubungkan orang dengan sejarah dan wilayah mereka, keragaman pada pengakuan atas martabat budaya yang sama, dan yang terpenting adalah keragaman yang mempromosikan pluralisme pendapat dan kepercayaan, serta keragaman yang menjadikan pendidikan menjadi pendorong emansipasi yang universal.

Dilanjutkan pada saat Presiden Hollande memberikan pidato pembukaan pada acara *Ambassadors’ Week* tanggal 25 Agustus 2015. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan beberapa topik yang menjadi perbincangan dunia kala itu, seperti *climate change*, terosisme, pariwisata Perancis dan tak lupa juga menyoroti masalah krisis imigran di Eropa yang semakin mengawatirkan. Dalam pidatonya beliau mengatakan,

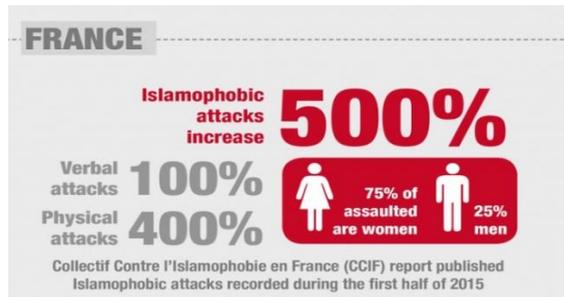
“..... *France must act humanely, at the European and international levels, towards those who are fleeing crises and wars, but also firmly, as not all types of migration are alike. We must respond to humanitarian emergencies, which do exist, organizing the intake of refugees and shouldering our asylum obligations* (Ambassade de France à Canberra, 2015).”

Hollande menanggapi masalah krisis imigran di Eropa termasuk juga negara Perancis dengan menegaskan bahwa Perancis harus bertindak secara manusiawi di tingkat Eropa maupun Internasional terhadap mereka yang melarikan diri dari negaranya akibat krisis dan perang. Imigran datang mayoritas dari negara yang berkonflik, mereka melarikan diri untuk mencari perlindungan dan bantuan dari negara penerima. Perancis memikul kewajiban untuk memberikan suaka dan perlakuan yang baik bagi imigran yang datang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Meningkatnya Fenomena Islamophobia tahun 2015-2016

Ditengah komitmen pemerintahan Presiden Francois Hollande dalam mempromosikan perdamaian, ditemukan fakta bahwa selama kurun waktu dari tahun 2015 hingga tahun 2016 sentimen islamophobia terus meningkat pesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dalam sebuah laporan resmi yang diterbitkan oleh *Collectif Contre l'Islamophobie En France* (CCIF), bahwa selama enam bulan pertama tahun 2015, serangan fisik anti-Muslim meningkat pesat mencapai 500%, sementara verbal meningkat 100%. Tindakan fisik terhadap tempat ibadah atau Masjid meningkat 400%. Dalam tindakan tersebut, 75 % diantaranya adalah wanita dan 25% adalah pria. Semua data atau angka tersebut didapatkan CCIF melalui kontak langsung dengan Muslim yang merasa dirugikan akan peristiwa yang menimpanya (Esteves, 2016).

Gambar 3.1 Peningkatan Fenomena Islamophobia tahun 2015



Sumber: (Esteves, 2016)

Memasuki tahun 2016, dalam sebuah wawancara bersama Abdel Aziz Chaambi selaku Presiden dari *Coordination Against Racism and Islamophobia* (CRI) ditemukan fakta bahwa mereka mencatat terjadinya kembali peningkatan serangan 130 % terhadap Muslim, sementara prosentase wanita yang diserang meningkat dari 80 % menjadi 90 %. Lebih lanjut, beliau mengatakan “tahun 2016 ditandai dengan normalisasi keadaan darurat dan menjadi titik balik kebrutalan polisi. Jumlah korban yang datang kepada kami telah mencapai tiga kali lipat, dan tidak ada satu kasus pun yang mengarah kepada penyelidikan atas tuduhan terror”. *Coordination Against Racism and Islamophobia* berhasil mengungkapkan statistik peristiwa yang terindikasi islamophobia sebagai berikut (Louati, 2017).

- 576 kasus serangan islamophobia
- 356 kasus yang terkait dengan keadaan darurat, 53 sedang diproses
- 95 kasus terkait dengan layanan publik dan administrasi, seperti sekolah, universitas, balai kota, rumah sakit, dan layanan sosial
- 87 kasus yang berkaitan dengan pasar tenaga kerja dan pelatihan

- 38 kasus melibatkan penyerangan verbal dan fisik di ruang publik.

Peristiwa diatas termasuk juga terjadinya penyerangan pada tempat-tempat ibadah Muslim secara terus-menerus di sepanjang tahun 2016. Menurut *Des Dômes & Des Minarets (Journal des Mosquées de France)*, 40 Masjid diserang pada tahun 2016 dan 20 masjid ditutup oleh pemerintah (Louati, 2017).

Seperti yang telah disinggung dalam paragraf sebelumnya bahwa serangan yang paling banyak terjadi secara garis besar diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni fisik dan verbal. Maka dari itu, dibawah ini penulis akan menguraikannya secara lebih rinci terkait dengan apa saja bentuk-bentuk peningkatan islamophobia yang terjadi pada kurun waktu 2015 hingga 2016.

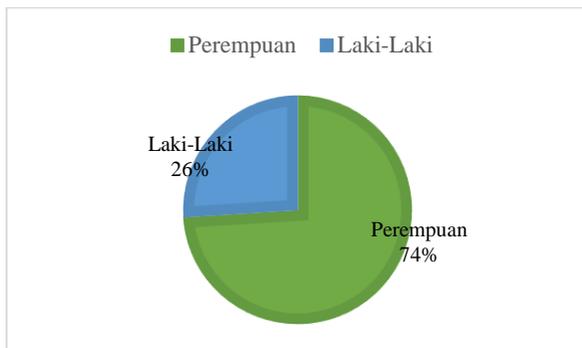
1. Serangan Fisik

a. Pemukulan dan penyerangan

Bentuk serangan fisik yang sering dilakukan pada tahun 2015 hingga 2016 yakni pemukulan dan penyerangan. Peristiwa ini sering terjadi pada area-area atau instansi publik di seluruh wilayah Perancis. Pelaku biasanya menasar masyarakat Muslim, baik pria, wanita atau bahkan anak-anak yang sedang berjalan, atau melakukan aktifitasnya. Pada tahun 2015, seorang pria Muslim ditikam 13 kali di depan istrinya di departemen Vaucluse (Collectif Contre l'Islamophobie en France, 2016). Pada tahun yang sama, seorang anak berusia 17 tahun diserang dan dipukuli oleh sekelompok orang di Bellecour Place. Saksi mata mengungkapkan bahwa selama kejadian itu berlangsung, kelompok tersebut terus meneriakan “*Islam, keluar dari Eropa*”.

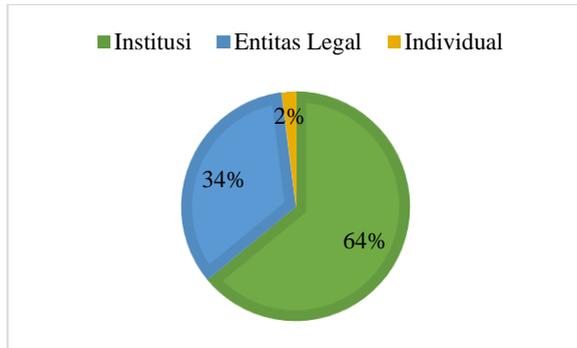
Selain peristiwa diatas, masih banyak kasus-kasus serangan fisik yang menargetkan Muslim, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa prosentase yang ditunjukkan dari pemukulan dan penyerangan yang terjadi mayoritas didominasi oleh perempuan. Dalam (Figure 3.3) menggambarkan bahwa perempuan mewakili hampir 80 % korban kekerasan islamophobia di Perancis. Seorang sosiolog bernama Amélie Le Renard mengungkapkan bahwa “Wanita Muslim menjadi sasaran karena mereka adalah wanita dan Muslim”. Serangan fisik dengan jelas menargetkan simbol-simbol Islam seperti kerudung serta bagian tubuh korbannya seperti sentuhan seksual. Pada tahun 2015, hampir 9 dari 10 laporan melibatkan perempuan. Mayoritas ditemukan pada institusi (Tabel 3.4) atau ruang publik, seperti balai kota, sekolah, jalan umum, kantor polisi, rumah sakit dan lain sebagainya.

Figure 3. 3 Tindakan Islamophobia Berdasarkan Gender tahun 2015



Sumber: (Collectif Contre l'Islamophobie en France, 2016)

Figure 3.4 Tindakan Islamophobia Menurut Jenis Pelaku pada tahun 2015



Sumber: (Collectif Contre l'Islamophobie en France, 2016)

Sudah disinggung sedikit mengenai alasan wanita menjadi target kekerasan fisik, yakni karena sebagian besar dari mereka memang menggunakan penutup kepala yang di syariatkan oleh Islam (kerudung) untuk dikenakan kemanapun dan kapanpun, hal tersebut yang membuatnya mudah utnuk terdeteksi oleh masyarakat Perancis yang merasa bahwa Muslim menonjolkan simbol-simbol keagamaan yang bersirisan dengan nilai-nilai negara Perancis. Sebabnya banyak dari mereka yang tak jarang menerima perlakuan fisik. Dalam kurun tahun 2015 hingga tahun 2016 banyak ditemukan peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan.

Dimulai pada Maret tahun 2015 seorang wanita berkerudung dianiaya di kota Saint-Etienne oleh wanita lain, putrinya berusia 11 tahun juga menjadi target dengan menarik lengannya. Pada bulan yang sama, di kota Toulouse, seorang wanita Muslim hamil delapan bulan diserang, kerudungnya ditarik dan menerima beberapa pukulan pada bagian perut. Di Aulnay-sous-Bois, orang tua dengan kasar merobek kerudung yang

dikenakan oleh orang tua salah satu siswa di depan pintu keluar sekolah. Beberapa bulan setelahnya, penyerangan kembali terjadi, seorang wanita muda berhijab diserang pada bagian wajah di kota Marseille. Memasuki tahun 2016, kekerasan terhadap perempuan masih terjadi, dan hampir pola penyerangan yang dilakukan sama seperti tahun sebelumnya yakni menasar pada identitas yang digunakan. Pada bulan September, Sh erazade, seorang siswa diserang di jalan oleh orang yang tidak dikenal, dia menderita beberapa luka tikaman di badannya (ORIW, 2018).

b. Pengrusakan dan fandalisme Masjid

Pada tahun 2015 terdapat lebih dari 2000 “ruang untuk sholat” yang terdaftar di Perancis, tetapi hanya sedikit dari mereka yang memenuhi syarat sebagai Masjid yang sebenarnya. Tudingan dari para tokoh Muslim yakni para pejabat Perancis sering menolak proyek-proyek konstruksi baru, dengan alasan akan berkontribusi pada kepadatan di masjid-masjid dan berimbas pada meluapnya jalan-jalan umum (Abdelkader, 2017). Selanjutnya, hal ini juga berbanding lurus dengan banyaknya ruang-ruang ibadah tersebut yang sering diciderai oleh orang-orang tidak dikenal dan tidak bertanggungjawab. Pada bagian ini, akan diuraikan mengenai beberapa contoh peristiwa-peristiwa yang berindikasi islamophobia dalam cakupan serangan fisik terhadap tempat ibadah dalam kurun waktu 2015 hingga 2016.

Banyak diantaranya dengan sengaja menjadi target pelemparan senjata api atau granat serta coretan grafiti, seperti yang terjadi pada awal bulan Januari 2015 di kota-kota seperti Le Mans (Sarthe), Port-la-Nouvelle (Aude), Villefranche-sur-Sa ne (Sa ne) dan Poitiers (Vienna). Bukan hanya menjadi target pelemparan, pada pertengahan bulan Agustus pada

tahun yang sama, pembakaran juga melanda Masjid Auch yang berada di Gers (Collectif Contre l'Islamophobie en France, 2016), polisi yang tiba di lokasi kejadian mencium bau bensin dan mendapati terali jendela yang dibongkar paksa, jaksa setempat menyimpulkan bahwa hal tersebut merupakan kejahatan yang direncanakan.

Gambar 3. 2 Kerusakan Masjid Auch yang di Bakar tahun 2015



Sumber: (McHug, 2015)

Memasuki bulan pertama tahun 2016, peristiwa demi peristiwa terus terjadi, pada tahun tersebut serangan didominasi dengan tindakan fandalisme yang berlebihan. Sebuah Masjid di Reu de la Mare di Blois didapati tulisan yang berbau rasisme “*Ici chrétien, fora Arab*” (disini Kristen, Arab diluar) didindingnya. Masjid Er-Rahma dicoret-coret oleh orang yang tidak dikenal, pada daun jendelanya ditandai dengan swastika (卐) atau simbol suci agama Hindu dan Salib Celtic atau simbol “kekuatan putih” (Gambar 3.3). Selanjutnya, fandalisme pada sebuah Masjid di Mérignac, Gironde, pada dindingnya ditemukan tulisan “Hidup Perancis”, “Salafi Keluar”

(Gambar 3.4). Dan pada akhir tahun 2016 ditutup dengan serangan pembakaran ruang doa Château-Thierry (Gambar 3.5) (ORIW, 2018). Petugas pemadam kebakaran turun tangan, sebagai isi ruangan rusak, termasuk furnitur dan karpet pada ruang sholat pria dan wanita. Al-Quran ditemukan terbakar, dan disinyalir digunakan untuk memulai titik api di ruangan tersebut (Radio France Internationale, 2016).

Gambar 3. 3 Fandalisme Masjid Er-Rahma



Sumber: (ORIW, 2018)

Gambar 3. 4 Fandalisme di Masjid Mérignac, Gironde



Sumber: (ORIW, 2018)

Gambar 3. 5 Pembakaran Ruang Doa Chateau-Thierry



Sumber: (ORIW, 2018)

c. Perusakan dan fandalisme sesuatu yang memiliki kedekatan dengan Muslim

Pada Maret 2015, ditemukan kembali fakta bahwa perusakan dan kasus fandalisme bukan hanya terjadi pada tempat ibadah atau Masjid saja, namun juga pada beberapa tempat atau sesuatu yang memiliki kedekatan dengan muslim, seperti usaha toko, restoran, rumah bahkan makam. Semua tak luput dari tindakan yang berbau islamophobia pada tahun 2015 hingga 2016. Pada bulan Maret 2015, sebuah komunitas Turki yang tinggal di Perancis menjadi sasaran beberapa label atau corat-coret di jendela tokonya. Tulisan-tulisan tersebut berbunyi “*tidak untuk Islamisasi di Perancis*”, “*hentikan Islamisasi di Perancis*”. Satu bulan setelahnya masih pada tahun yang sama, orang yang tidak dikenal melepaskan tembakan kepada keluarga Muslim di Thiéfosse, sebuah desa di Vosges. Mobil keluarga yang diparkir di luar rumah dibakar, dua salib berbentuk *swastika* digambar pada dinding rumah korban (ORIW, 2018).

Selanjutnya, peristiwa pada bulan November 2015 yang menargetkan sebuah restoran kebab di Blaye. Serangan dilakukan dengan menggunakan satu buah senjata oleh orang yang tidak dikenal, polisi melakukan investigasi dan mendapati tidak ada korban yang terluka dalam peristiwa tersebut. Memasuki tahun 2016, sebuah makam Muslim di pemakaman St Symphorien telah dinodai. Pihak yang bertanggung jawab atas pemakaman berdalih bahwa makam rusak akibat terkena angin, tetapi keluarga pemilik makam bereaksi keras dengan menunjukkan bukti bahwa peristiwa tersebut akibat dari dirusak oleh tangan manusia, bukan diakibatkan oleh alam (Gambar 3.6).

Gambar 3.6 Pengrusakan Makam Muslim di St Symphorien



Sumber: (ORIW, 2018)

2. Serangan Verbal

a. Penolakan dan Intimidasi

Tahun 2015 hingga tahun 2016 banyak ditemukan serangan verbal yang berindikasi islamophobia berupa perkataan penolakan masyarakat Perancis terhadap kelompok Muslim dengan nada intimidasi yang diucapkan oleh para tokoh politik atau

masyarakat dari kalangan biasa. Seperti contohnya mengenai penggunaan kerudung atau *hijab* dikalangan masyarakat Muslim yang kurang bisa diterima oleh penduduk Perancis sehingga menjadi sebuah kontroversi yang mengundang polemik bagi Perancis. Mulai dari mantan Presiden Nicolas Sarkozy menyatakan di stasiun radio *Europe 1* bahwa ia tidak ingin wanita berjilbab di Perancis, sampai dengan pertengkaran antara Dokter dan salah satu pasiennya. “*Anda membawa skandal untuk semua wanita, saya sepakat dengan kebebasan wanita, sehingga kerudungmu adalah tanda agama yang mencolok dan itu ilegal*”, “*saya tidak ingin wanita berkedurung di Perancis*”, kata Dokter, selama pertengkatan berlangsung.

Dilanjutkan dengan diterimanya surat intimidasi kepada *Union Islamique* (Uni Islamiq), yang berbunyi “*Les Arabes dehors. La France ne vous supporte plus. Vous serez châtiés par les dieux*”, “*Orang-orang Arab, keluar. Perancis tidak tahan lagi dengan kalian. Dewa akan menghukum kalian semua*”. Masyarakat Muslim terus menjadi target penolakan dan intimidasi dari penduduk yang tidak nyaman atas keberadaan mereka di Perancis. Akhir tahun 2015, hampir 500 orang berkumpul di dekat Konsulat Jerman di Paris untuk memprotes penerimaan pengungsi di Eropa. Para demonstran menuduh “orang-orang buangan” akan membawa identitas, agama Islam, dan cara hidup yang sangat berbeda sehingga membuat orang Eropa tidak stabil (ORIW, 2018). Pernyataan tersebut sangat menciderai para pendatang termasuk warga Muslim.

Di Hauconcourt di wilayah Lorraine, seorang karyawan perusahaan pembersihan jalan umum Perancis mengajukan keluhan terhadap bosnya akibat penghinaan dan intimidasi yang diterimanya.

Mustapha, pada bulan Juli 2016 berniat untuk menemui bosnya pada pukul 6 sore untuk berdiskusi sebentar mengenai suatu hal, namun secara tidak sengaja, Mustapha memercikkan tangki air kearah bosnya, lalu sang bos murka seraya berkata “*suatu hari, saya akan memenggal kepalamu dan saya akan meletakkan kepalamu di ambang pintu. Kamu seorang Muslim!*”. Ketakutan, Mustapha langsung melaporkan keluhan atas penghinaan tersebut ke kantor polisi. Serangan-serangan verbal berbentuk penolakan dan intimidasi seharusnya bisa dihindarkan, dengan membangun rasa saling menghargai di antara semua entitas diharapkan perdamaian akan terwujud.

b. Labeling

Makna dari *labeling* disini adalah masyarakat Perancis melihat Muslim atau Islam yang disamakan dengan suatu hal yang buruk atau baik, namun dalam hal ini lebih dikategorikan pada sesuatu hal yang buruk. *Labeling* terhadap islam dapat meliputi berbagai aspek, seperti menganggapnya teroris, penyebab kerusuhan, dan lain-lain. Dicontohkan pada peristiwa bulan Januari 2015 yang terjadi kepada Ahmed, anak berusia delapan tahun yang dingatkan oleh gurunya karena tidak menghormati saat mengheningkan cipta, lalu Ahmed mengatakan, “... *aku bersama para teroris*”. Gurunya langsung melaporkannya ke polisi tanpa berdiskusi terlebih dulu dengan memanggil orang tuanya, meskipun ketika ditanyai polisi, anak itu mengaku tidak tahu apa itu teroris. Guru Ahmed mengalami rasa panik yang berlebihan perihal apa yang diucapkan si anak, tanpa mendalami kasusnya dengan orang tua terlebih dahulu. Guru terlalu cepat memberi label bahwa “anak tersebut islam, dan dia berbicara seperti itu”, lalu menganggap apa yang diucapkan si anak betul, bahwa

Ahmed *pro* terhadap teroris (Collectif Contre l'Islamophobie en France, 2016).

Selanjutnya, pada tahun yang sama, serangan terhadap muslim secara verbal terus berlanjut. Philippe Tesson seorang jurnalis terkenal secara terbuka menyatakan di stasiun radio *Europe 1*: “*Muslim adalah orang-orang yang membawa omong kosong di Perancis*”. CCIF selaku organisasi anti-islamophobia mengangkat kasus ini dan menyampaikan surat kepada jaksa penuntut umum Paris untuk memanggil yang bersangkutan. Philippe Tesson lalu menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud untuk mencela umat Islam dengan perkataannya. Dilanjutkan pada satu bulan berikutnya, pada Februari 2015 Roger Cukierman selaku Presiden CRIF (*Representative Council of French Jewish Institutions*) atau Dewan Perwakilan Lembaga Yahudi Perancis, menyatakan juga pada stasiun radio *Europe 1* bahwa “*semua kekerasan (di Perancis) dilakukan oleh kaum muda Muslim*” (Collectif Contre l'Islamophobie en France, 2016).

Christian Estrosi selaku pemimpin wilayah Provence-Alpes-Côte d'Azur juga turut memperkeruh suasana dengan menyatakan bahwa “perang dunia ketiga” sedang berlangsung dan menyatakan bahwa “*fasisme islam mengancam peradaban Yahudi-Kristen*”. Memasuki tahun 2016, juga terdapat salah satu kasus yang menyita banyak perhatian, yakni pelayan restoran di Seine-Saint-Denis yang menolak untuk melayani dua wanita yang mengenakan jilbab, seraya mengatakan “*semua teroris adalah Muslim dan semua Muslim adalah teroris*” (ORIW, 2018)